

**KONSTRUKSI MASYARAKAT TENTANG KETERLIBATAN KELUARGA PESANTREN
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI TAMBAKBERAS JOMBANG**

Firzatunisak

S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
zmubarok37@yahoo.co.id

M. Arif Affandi

S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
intermilaniacs@gmail.com

Abstrak

Ketidak berhasilan tokoh pesantren yang terlibat di politik dalam pemilihan legislatif tahun 2014 menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, keterlibatan tokoh pesantren dalam ranah politik praktis bukan saja berdampak pada eksistensi politik pesantren dan komunitasnya, namun juga berakibat luas bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pesantren sebagai sumber rujukan keagamaan dan referensi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengambarkan dan menganalisis pola konstruksi masyarakat terhadap partisipasi politik tokoh Pondok Pesantren Tambakberas Jombang dalam pemilihan legislatif 2014 Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Menurut Berger dan Luckman, setiap individu mencari pengetahuan dan kepastian bahwa fenomena nyata adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan sehari-hari individu. Berger juga menyebutkan bahwa masyarakat pada akhirnya terbagi dalam dua bagian, yaitu masyarakat sebagai realitas obyektif dan masyarakat sebagai realitas subyektif. Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan berganda yaitu obyektif dan subyektif, maka mereka berproses melalui tiga momen dialektis, yaitu: eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat mengkonstruksikan keterlibatan keluarga pesantren dalam politik dengan dua kategori, yaitu sebagian kecil mereka setuju dengan keterlibatan keluarga pesantren dalam politik dan sebagian besar tidak setuju dengan keterlibatan keluarga pesantren dalam politik.

Kata Kunci : konstruksi masyarakat, politik, tokoh pesantren

Abstract

Several unsuccessful pesantren leaders involved in politics in the legislative elections in 2014 be an interesting thing to study. As in Pondok Pesantren Tambakberas Bahrul Ulum Jombang, the involvement of pesantren leaders in the realm of practical politics not only have an impact on the political existence of the school and community, but also resulted in extensive for people who have to make boarding as a reference source of religious and political references. The purpose of this study was to analyze the pattern is a portrait and the construction of society to political participation figures Tambakberas boarding school in Jombang 2014 legislative elections. This study uses the theory of social construction of Peter L. Berger and Thomas Luckman. According to Berger and Luckman, every individual seeking knowledge and certainty that the phenomenon is real and has a special characteristic in the daily life of individuals. Berger also said that the community was eventually split into two parts, namely the public as an objective reality and society as subjective reality. When the community is seen as a reality that is objective and subjective double, then they proceed through three dialectical moments, namely: externalizing, and internalizing obyektivasi. This study suggests that people construct boarding family involvement in politics with two categories, namely small portion they agree with pesantren family involvement in politics and most do not agree with the pesantren family involvement in politics.

Keywords: construction of society, politics, leaders boarding

PENDAHULUAN

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Dalam dunia keagamaan dan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus dibedakan. Di satu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam.

Di pihak lain, adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut selernya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Karena bila agama berada di dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama, masyarakat, dan hukum.

Dalam agama Islam Paradigma pemikiran yang berkembang seputar korelasi antara politik dan agama, selalu diwakili dua kutub pemikiran yang bertolak belakang. Qaradhawi mengistilahkannya dengan kelompok sekuler dan kelompok Islamis. Masing-masing kelompok ini intens mengembangkan premis-premis yang mendukung pendapatnya dalam berbagai tulisan, buku, dan wacana (Nasution Parlungun, 2014).

Perspektif kaum sekuler dan materialis selalu menganggap bahwa agama tidak lebih hanya sebatas hubungan vertikal antara seorang individu dengan Tuhannya. Bahkan mereka mengklaim bahwa agama dan politik adalah suatu hal yang mustahil untuk dipertemukan. Agama bersumber dari Tuhan, karakteristiknya pun selalu identik dengan nilai-nilai kesucian, dan tujuan jangka panjangnya adalah kehidupan akhirat. Sementara politik adalah kreatifitas dan rekaan akal manusia, karakteristiknya pun selalu kotor dan penuh tipu daya, dan tujuan akhirnya tidak lebih hanya pemuas kehidupan dunia. Pemikiran ini berkembang di dunia barat, namun cukup banyak juga pemikir Arab dan dunia Islam yang berpikiran sama, semisal Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Pasha.

Berbeda dengan tokoh-tokoh seperti Khairuddin At-Tunisy, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Syakib Arselan, dan Al-Maududi. Mereka melihat bahwa Islam,

disamping sebagai akidah, juga merupakan syariah, peraturan, serta perundangan yang mengatur seluruh dimensi kehidupan. Islam sebagai akidah dan syariah, dakwah dan negara, serta agama dan politik. Pemikiran mereka secara spesifik berangkat dari tiga perspektif (Nasution Parlungun, 2014).

Pertama, Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh dimensi kehidupan. Baik dimensi materiil ataupun spirituil, baik secara individu maupun kolektif dalam konteks kehidupan bernegara. Kedua, Islam sangat mengancam sikap parsial dalam pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilainya, karena seluruh aturan dan dogma yang ada di dalamnya merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, Sejak dahulu kala hingga saat ini, peradaban dan kebudayaan dimanapun sadar bahwa sebuah institusi negara atau kekuatan politik merupakan salah satu sarana terpenting untuk menjalankan seluruh aktifitas penerapan hukum, perundangan, pengajaran, dan perlindungan terhadap segala bentuk kerusakan secara internal, maupun serangan dari kekuatan luar yang berniat untuk merampas ataupun menjajah.

Di Indonesia kita mengenal salah satu kelompok sosial-religius yaitu santri dan pesantren. Clifford Geertz ahli antropologi asal Amerika Serikat yang terkemuka, menggunakan istilah tersebut secara luas dalam karyanya, *The Religion of Java* (1960). Pesantren adalah sebuah dunia yang menarik dikaji dan diteliti. Meskipun selama ini banyak peneliti menjadikan pesantren sebagai objek kajian, selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum bisa diungkap. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekayaan khazanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan masih tetap eksis hingga kini, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat sekaligus unik dalam sistem politik di Indonesia.

Sejauh ini perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik-menarik dua pendapat yang saling bertolak belakang. Tarik-menarik tersebut antara pendapat yang mengabsahkan serta menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik. Pendapat pertama mengasumsikan bahwa komunitas pesantren bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain. Mereka didukung oleh argumentasi teologis bagaimana dan mengapa praktik politik praktis dipilih. Pendapat ini semakin kokoh apalagi didukung realitas semakin banyak pemimpin pesantren (tokoh pesantren) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak. Pendapat kedua mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat. Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap "kotor". Karena itu, bagaimanapun baik dan kokoh landasan serta

argumentasi teologisnya, pesantren yang terlibat politik akan terseret ke dalam dunia yang “kotor” pula.

Perdebatan seperti itu memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis untuk mendukung pendapat mereka. Kedua pendapat tersebut akan diletakkan sebagai dasar pijak untuk menjawab permasalahan mengapa semakin banyak pesantren yang terlibat dalam politik, apa motif yang melatarbelakangi, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, keterlibatan tokoh pesantren dalam ranah politik praktis bukan saja berdampak pada eksistensi politik pesantren dan komunitasnya, namun juga berakibat luas bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pesantren sebagai sumber rujukan keagamaan dan referensi politik. Dan Bagaimana konstruksi masyarakat Tambakberas Jombang tentang keterlibatan keluarga pesantren dalam pemilihan legislatif tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Konstruksi sosial (social construction) merupakan teori sosiologi kontemporer yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kedua tokoh ini lebih menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dan realitas sosialnya. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya.

Berger mendasarkan diri pada dua gagasan sosiologi pengetahuan yaitu “realitas” dan “pengetahuan”. “Realitas” dianggap sebagai “*a quality pertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our volition*” (kualitas yang melekat pada fenomena yang kita anggap berada di luar kehendak kita). Maksudnya realitas merupakan fakta sosial yang bersifat eksternal, umum, dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Suka atau tidak suka, realitas tetap ada. Sedangkan “pengetahuan” di artikan sebagai “*he certainty that phenomena are real and that they possed specific characteristic*” (keyakinan bahwa suatu fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik tertentu), maksudnya pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran.

Terdapat 3 tahap konstruksi sosial Berger, yaitu:

Eksternalisasi

Penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk dunia manusia atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*).

Objektifikasi

Interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, atau objektifikasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu fasilitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

Internalisasi

Individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial, tempat individu menjadi anggotanya. Atau lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*man is a social product*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tambakberas Kecamatan Jombang. Desa Tambakberas juga termasuk lokasi pondok pesantren Bahrul ‘Ulum. Alasan ini dipilih oleh peneliti karena banyak kalangan Kyai dan keluarganya mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif baik dari Daerah sampai tingkat Nasional serta respon masyarakat terhadap pilihan politik yang tidak dipengaruhi dengan status sosial calon legislatif.

Subjek penelitian tersebut diambil dengan cara *Purposive*. Pengambilan subyek ini dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif. Dasar pertimbangannya ditentukan oleh peneliti sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masalah. Dasar pertimbangan yang pertama adalah Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan Suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Jombang. Dasar yang kedua adalah masyarakat Tambakberas memiliki dua kelompok yang dominan yaitu kelompok santri dan abangan, ini menjadi menarik untuk melihat pilihan politik masing-masing kelompok

Tahap analisis data dimulai dari menelaah data hasil wawancara dan hasil pengamatan yang sudah dicatat dalam bentuk *fieldnote* yang terkumpul. Sehingga dalam proses penyajian data memudahkan peneliti terutama

dalam melihat konstruksi masyarakat Tambakberas Jombang tentang keterlibatan keluarga pesantren dalam pemilihan legislatif. Selanjutnya dilakukan reduksi data, ini dilakukan untuk memilah-milah hal-hal yang dianggap penting dan merupakan informasi kunci. Setelah prose reduksi selesai maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan juga merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Sebagai Alat Untuk Mencari kekuasaan

Kekuasaan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh hasil yang dimiliki seseorang. Banyak individu yang masuk dalam dunia politik karena mencari kekuasaan. Untuk dapat mencapainya, seseorang dapat melakukan kecurangan dan ketidakjujuran demi kepentingan dirinya sendiri. Hal ini yang nantinya akan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam dunia politik.

Politik adalah penggunaan kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakpastian dan konflik adalah suatu hal yang biasa dan tidak bisa dihindari. Politik adalah cara untuk mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak.

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin masif di Indonesia akhir akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh tokoh pesantren dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren. Dengan manajemen keuangan yang sangat sederhana, pesantren harus memperhatikan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Dalam sejarah perkembangan pesantren, beberapa pesantren 'terpaksa' gulung tikar karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional pendidikan yang dijalankan. Pendapatan yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang tidak tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan solusi yang tepat (Muchratom Zaini, 1988).

Situasi ini sering mendorong para tokoh pesantren dan pengelola pesantren untuk memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan untuk pembangunan pesantren. Di beberapa tempat pengelola pesantren berhasil memperoleh bantuan keuangan secara reguler dari pemerintah daerah atau pihak Kementerian Agama. Bahkan sebagian mendapat bantuan fisik berupa pembangunan infrastruktur pesantren.

Bantuan-bantuan itu biasanya tidak gratis, karena pihak pemberi bantuan menuntut hal-hal tertentu. Dalam kasus di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, tawaran untuk menerima bantuan secara reguler dari pemerintah diringi dengan permintaan untuk mengakomodasi kurikulum yang disediakan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional. Pesantren Bahrul Ulum menyikapi secara kreatif dengan mendirikan

pesantren baru dalam lingkungan pesantren Tambakberas Jombang dengan basis pengetahuan modern.

Selain menempuh cara tersebut, tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Dengan pengaruh sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren dapat melakukan bargaining politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, dari sekedar dukungan moril dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres atau Pileg. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan bargaining politik dengan kompensasi ekonomi, namun fakta tentang bantuan yang diterima juga diakui.

Politik Sebagai Sarana dalam Perjuangan

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, maka basis argumentasi politik pesantren jelas bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut didasarkan dari penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah serta paparan ulama-ulama terdahulu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab kuning) yang sering dikaji di Pesantren. Umumnya komunitas pesantren memandang bahwa politik merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai dengan ajaran ulama adalah hukumnya fardhu kifayah.

Pandangan ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang menyatakan *man la yatimmuh al wajib illah bihi, fahuwa wajib* (jika sesuatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dalam logika ini bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, maka hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah). Dalam teori politik Islam, pemahaman seperti ini lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat dilepas-pisahkan (Rusadi, 1988).

Jadi penulis menyimpulkan tentang arti politik bahwa politik adalah sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadist dan merupakan cara dalam menyampaikan dakwah. Tokoh pesantren memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi masyarakat Tambakberas Jombang. Seperti teori Weber tentang tindakan sosial yang mana teori tindakan sosial tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya dalam masyarakat, akan tetapi teori tindakan sosial mempunyai tipe yang terdiri dari empat macam dan salah satu teori tindakan sosial tersebut, teori tindakan sosial bentuk tindakan manusia. Yang bernama tradisional untuk mencakup tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada.

Politik Mengabaikan Pendidikan Santri

Keterlibatan tokoh pesantren dalam politik praktis membawa implikasi terhadap pesantren, khususnya minat belajar santri. Implikasi tokoh pesantren berpolitik bagi pesantren ialah berkurangnya kesempatan tokoh pesantren dalam membina pesantren. Hal ini disebabkan karena aktivitas politik membuat para tokoh pesantren tersebut harus sering keluar untuk koordinasi maupun kegiatan politik lainnya. Secara khusus, keterlibatan tokoh pesantren dalam politik praktis membawa implikasi terhadap minat belajar santri. Hal ini disebabkan karena mereka kurang perhatian terhadap para santri dan aktivitas mengajarnya. Pendidik (dalam hal ini tokoh pesantren) sangat menentukan terhadap besar kecilnya minat belajar santri. Untuk mempermudah menganalisis dari implikasi keterlibatan tokoh pesantren dalam politik praktis, penulis berusaha melihat yang sudah diungkapkan oleh Fatimah.

Keterlibatan pesantren dalam politik membawa implikasi terhadap eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang didukung oleh pesantren. Bagi pesantren yang tokoh pesantrennya terlampaui sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal ini disebabkan aktifitas politik membuat para tokoh pesantren harus sering keluar untuk koordinasi, rapat dan kegiatan politik lainnya. Di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang aktifitas politik dari tokoh-tokoh pesantren selama pemilu 2009, membuat pengelolaan pesantren yang dipimpinnya cukup terbengkalai. Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh Tokoh pesantren atau pimpinan pesantren bila mereka ingin terlibat dalam politik.

Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Tokoh pesantren atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampaui aktif dalam peran politiknya (political oriented) sangat mungkin akan ditinggal oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu.

Politik Mencerminkan Kepentingan Pribadi dan Golongan

Keterlibatan tokoh pesantren dalam politik berdasarkan konstruksi masyarakat Tambakberas Jombang adalah untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal ini diperkuat pendapat-pendapat masyarakat tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya perubahan gaya hidup, rumah, mobil dan lainnya. Pendapat yang berkembang dalam masyarakat ketika keterlibatan tokoh dalam politik hanya serta merta untuk kepentingannya sendiri. Menurut masyarakat Tambakberas Jombang keterlibatan mereka dalam Politik tidak diawali dengan modal sosial yang cukup, melainkan dengan pendekatan yang incidental. Misalnya dalam keinginannya untuk memenangkan dalam pemilihan

Legislatif dengan cara membeli suara ke masyarakat tidak menggoyahkan hati pemilih masyarakat Tambakberas Jombang.

Tingkat komunikasi adalah pertimbangan bagi masyarakat Tambakberas Jombang dalam memilih calon Legislatif, pemisahan status antara masyarakat dengan keturunan kyai, untuk hubungan komunikasi non formal jarang dilakukan, komunikasi non formal dilakukan pada saat hari raya atau acara-acara tertentu.

Dengan demikian masyarakat Tambakberas Jombang tidak selalu mendapatkan porsi untuk dapat menyalurkan pendapat dan keluhan-keluhan masyarakat tentang berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur desa dan aspek-aspek yang lainnya. Rata-rata masyarakat memiliki penilaian bahwasanya tokoh-tokoh politik keluarga Pondok Pesantren Tambakberas Jombang yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang hanya melakukan komunikasi pada saat terjadi moment-moment tertentu seperti pemilihan Bupati atau program-program yang berhubungan dengan kepentingan partai politik dari masing-masing tokoh itu sendiri.

Dari komunikasi yang jarang terjadi itulah, masyarakat mengaku kurang memiliki pengetahuan yang konkrit terhadap sosok tokoh-tokoh politik keluarga Pondok Pesantren Tambakberas Jombang yang mewakili masyarakat dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan politik di Indonesia sebagian besar lebih berkuat pada politik mikro yang terbatas pada hubungan-hubungan antara aktor-aktor politik, yang terbatas pada tukar-menukar kepentingan politik. Sedangkan pada politik makro tidak terlalu diperhatikan dimana merupakan tempat terjadinya tukar-menukar kekuatan-kekuatan sosial seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society, dan sebagainya.

Politik Mendelegitimasi Kelembagaan Pesantren

Secara tradisional masyarakat memandang pesantren sebagai sumber legitimasi moral. Tokoh pesantren dan pesantren adalah panutan dan pembimbing umat. Sebagai sumber moral dan panutan umat pesantren diharapkan menjadi teladan dalam mempraktekkan Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu tokoh pesantren dan komunitas pesantren tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kewibawaan dan integritas, semisal keterlibatan pesantren dalam politik praktis.

Memang tidak selamanya politik praktis sebagai "barang kotor", akan tetapi pemahaman masyarakat umum telah menempatkan politik sebagai media persaingan perebutan kekuasaan. Para Tokoh pesantren pesantren misalnya akan menerima imbas dari persepsi umum ini. Konsekwensinya, predikat uswah hasanah pesantren tentu akan tercerabut legitimasi sosialnya. Petuah, nasihat maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Tokoh pesantren akan dibaca dalam konteks politik.

Fenomena pesantren dan politik yang terjadi di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dapat membantu menjelaskan bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran sikap politik pemilih muslim, dari tipologi

ideologis dan kharismatis ke sikap politik yang lebih rasional. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan disurituladani. Serta sikap pesantren yang sebetulnya adalah murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pertama, makna tokoh pesantren berpolitik bagi masyarakat memunculkan dua varian. 1) Sebagian (kecil) mereka setuju dengan keterlibatan tokoh pesantren di politik dengan alasan tokoh pesantren memiliki legitimasi politik untuk menegakkan paham ahlussunnah wal jama'ah, sebagaimana yang menjadi pedoman warga nahdliyyin, sehingga akan lebih memudahkan para tokoh pesantren untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai pemimpin umat dan pengasuh pesantren. 2) Sebagian (besar) mereka tidak setuju dengan alasan akan mengganggu tugas utamanya.

Dua varian makna tokoh pesantren berpolitik bagi masyarakat, secara umum memiliki implikasi tersendiri terhadap 1) degradasi ketokohan tokoh pesantren sebagai akibat dari semakin merosotnya kharisma yang dimiliki serta otoritas keagamaannya semakin terkikis; 2) perannya sebagai benteng moralitas umat menjadi taruhan. Sebab bagaimanapun, ketika tokoh pesantren bersentuhan dengan politik, berarti sedang "bermain-main" dengan kekuasaan. Hal yang demikian, politik akan cenderung hanya dijadikan sebagai media untuk meraih kekuasaan, dan predikat menjadi teladan umat (al-uswah al-hasanah) tentu saja akan tercerabut dari legitimasi sosial masyarakat.

Kedua, fragmentasi pilihan politik tokoh pesantren dipahami oleh masyarakat dalam dua bentuk. 1) Terjadi segmentasi kepemimpinan tokoh pesantren, terutama kepemimpinan politik tokoh pesantren di masyarakat. Kekuasaan politik tidak lagi terpusat pada satu tokoh pesantren, melainkan terdistribusi ke seluruh tokoh pesantren yang terlibat dengan politik. Akibatnya, ketika berpihak pada salah satu kekuatan politik tokoh pesantren dinilai tidak lagi netral. 2) Sebagai akibat langsung dari yang pertama, masyarakat menjadi terpolarisasi. Perpecahan di kalangan umat-pun kadang tidak bisa dihindari karena para tokoh pesantren sendiri sibuk dengan kepentingan politiknya, sementara urusan umat menjadi terkesampingkan. Bahkan fragmentasi politik di akar rumput cenderung semakin menguat ketika kepentingan-kepentingan politik dibumbui teks-teks agama sebagai pembenar. Meski demikian, tokoh pesantren yang mengalami fragmentasi pilihan politik, bukan berarti ketaatan mereka terhadap tokoh pesantren mengenai masalah keagamaan menjadi hilang sama sekali. Semua tokoh pesantren, menurut pandangan mereka, sangat dihormati. Meskipun harus dicatat bahwa penghormatan itu semata-mata karena posisi tokoh

pesantren sebagai tokoh agama yang memimpin pesantren.

Ketiga, keterlibatan tokoh pesantren di politik melahirkan pergeseran pemahaman di kalangan masyarakat (Tambakberas). Perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor. 1) Faktor konsistensi (istiqamah) tokoh pesantren. Fenomenanya, tokoh pesantren sering -- untuk mengatakan selalu- berhijrah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Kesan ini menjadikan kredibilitasnya dipertanyakan. 2) Akibat dari hal tersebut, tokoh pesantren tidak memiliki keberpihakan kepada umat, justru yang terjadi adalah tokoh pesantren cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 3) Karena rasionalitas pemilih. Dalam menentukan pilihan politik, masyarakat tidak semata-mata melihat figur tokoh pesantren, melainkan pada aspek visi dan misi serta program yang ditawarkan, baik oleh partai politik maupun seorang calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartaprawira, Rusadi. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Liddle, R. Willian. 1997. *Islam, Politik, dan Modernisasi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Madjid, Nurcholil. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*, Jakarta : INIS..
- Nashir, Haedar. 2006. *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang : UMM Press.

Literatur-Literatur Lain

- Hasmirah, Budaya Politik Etnis Tionghoa. Skripsi, 2007. www.google.com, Nasution Parlungan. Agama dan Politik, 2010.